

## PENGUATAN LEGALITAS UMKM DI WILAYAH KOTA MALANG

Abdul Madjid<sup>1)</sup>, Umu Sa'adah<sup>2)</sup>, Adipandang Yudono<sup>3)</sup>, Andan Linggar Rucitra<sup>4)</sup>, Mahmuddin Ridlo<sup>5)</sup>,  
Permata Cinta Ilahi<sup>6)</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Jurusan Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

<sup>2)</sup> Dosen Jurusan Matematika, Universitas Brawijaya, Malang

<sup>3)</sup> Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Brawijaya, Malang

<sup>4)</sup> Dosen Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang

<sup>5)</sup> Staff Pusat Layanan KKN, Universitas Brawijaya, Malang

<sup>6)</sup> Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Brawijaya, Malang

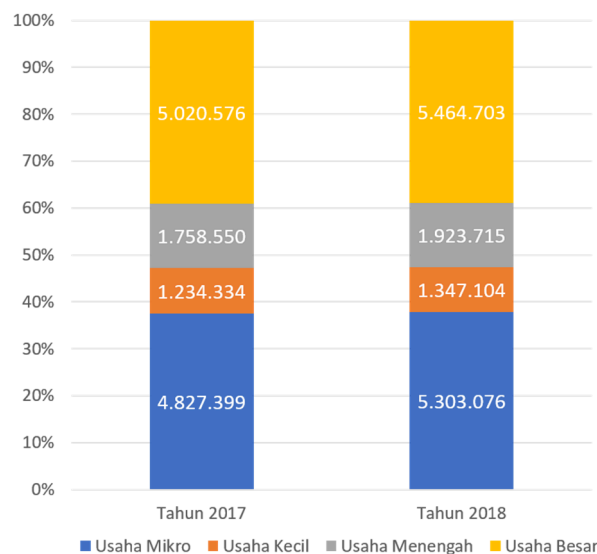
### ABSTRACT

The purpose of this activity is to help SMEs in Malang City to get legal strengthening. Business legality is a standard that must be met by business actors. MSME actors must meet these requirements in order to compete in the free market era. Through the Doctoral Program in Serving Institutions of Universitas Brawijaya, encouraging the legality of MSME Partners of Diskoperindag processed rhizomes in the Malang City area in the form of mapping business profiles, assisting BPOM and financial bookkeeping. The legality target is the establishment of product certification for processed rhizomes. The preparation stage begins with the coordination of UB's Institutional DM Team with Malang City's Diskopindag to collect MSME development documentation. Monitoring and evaluation is carried out regularly at each stage of the activity. The result of the DM activity is the establishment of a collaboration (MoU) between the Malang City Government and Brawijaya University regarding the development of MSME Herbal Medicine in the Malang City area as well as a roadmap to strengthen the legality of MSMEs in Malang City.

**Keywords:** MSME, Rhizome Processed Products, Mapping, Financial Accounting.

### 1. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tumbuh di wilayah pedesaan maupun perkotaan sangat berpotensi sebagai penggerak ekonomi bagi bangsa, karena terbukti ketahanannya dalam kondisi krisis moneter tahun 1998 dan krisis global tahun 2008. Berdasarkan Data Kemenkop UKM (2019), UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dengan proporsi sebesar 99,99% dari total keeluruhan unit usaha di Indonesia atau sebanyak 54,19 juta unit. UMKM menyumbang PDB Harga Berlaku sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat [1]. Perkembangan PDB Harga Berlaku pada UMKM tahun 2017-2018 disajikan pada Gambar 1.1. berikut.



Gambar 1. PDB Harga Berlaku pada Unit Usaha (Rp Milyar)

<sup>1</sup> Korespondensi penulis: Abdul Madjid, 085712987189, mahmuddin.ridlo@gmail.com

PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp 7.820.283 milyar sedangkan tahun 2017 sebesar sebesar Rp 8.573.895 milyar. Selain sebagai tulang punggung perekonomian nasional, beberapa kontribusi positif UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata. Kontribusi PDB UMKM sebesar 61,07% (Rp 8.573,90 triliun) dengan laju pertumbuhan 9,64% pertahun. UMKM menyumbang ekspor non-migas 14,37% (Rp 293,84 triliun) dari total ekspor nasional [1].

Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Jumlah penduduk Kota Malang menurut Hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 843.810 orang. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 sebesar 0,28 persen. Rasio jenis kelamin di Kota Malang pada tahun 2020 sebesar 99,05% [2]. Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur yang juga merupakan Kota Pendidikan. Kota Malang juga dikenal kota kuliner dengan UMKM kuliner yang tersebar dimana-mana. UMKM di Kota Malang sangat beragam baik di bidang fashion, makanan minuman sampai dengan kerajinan tangan (*crafting*). Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Malang, dari 70.000 UMKM yang ada saat ini, baru 30% yang sudah *go online* [3].

Perguruan tinggi berperan untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memajukan ekonomi daerah [4]. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku UMKM dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Pada tahun pertama (2021), program Doktor Mengabdikan (DM) Institusi Universitas Brawijaya berupaya untuk penguatan legalitas UMKM olahan rimpang di wilayah Kota Malang dalam bentuk pemetaan profil usaha, pendampingan BPOM dan pembukuan keuangan.

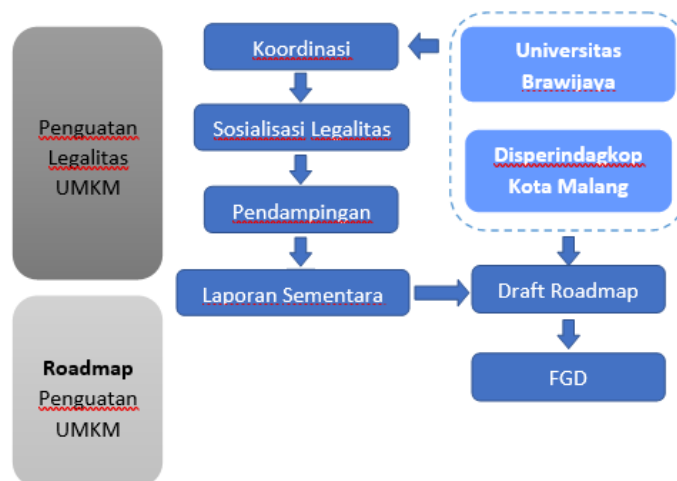
**2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pelaksanaan Program Doktor Mengabdikan Institusi di wilayah Kota Malang pada tahun pertama (2021) dilakukan dengan beberapa tahapan. Program DM Insititusi dirancang untuk memberikan solusi dan target luaran secara bertahap dan sistematis pada penguatan UMKM Kota Malang melalui pemberdayaan stakeholder UMKM. Sinkronisasi Program Doktor Mengabdikan Institusi dengan Program Kerja / RPJMD Kota Malang secara berkelanjutan sampai tahun depan dilakukan untuk mencapai target luaran.

1) Program Kegiatan

Koordinasi Program Kerja/RPJMD Kota Malang sebagai dasar pertimbangan kegiatan pengabdian pada tahun 2021 oleh tim DM Institusi Universitas Brawijaya terhadap pelaku UMKM dan *stakeholder* terkait. Tim DM merencanakan serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menyusun program kegiatan penguatan legalitas UMKM di wilayah Kota Malang. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi Tim DM Institusi UB dengan Diskopindag Kota Malang untuk mengumpulkan dokumentasi pengembangan UMKM. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan rutin pada setiap tahapan kegiatan.

Pada tahun pertama (2021), kolaborasi mitra pemberdaya (ABCGM: Academic, Bussines, Community, Government, Media) dalam penguatan UMKM di wilayah Kota Malang sebagaimana konsep kegiatan pada Gambar 2. berikut.



Gambar 2. Kolaborasi mitra pemberdaya (ABCGM) dalam DM Institusi UMKM Kota Malang tahun 2021

## 2) Tahapan Kegiatan

Target program DM adalah adanya penguatan legalitas UMKM mitra Diskoperindag Kota Malang. Pada tahun Pertama (2021), tim DM memiliki berbagai tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Tahapan program dari sinergisitas tim DM Institusi Universitas Brawijaya dengan UMKM mitra Diskoperindag Kota Malang dan stakeholder terkait pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan program Doktor Mengabdikan di Desa Pengadahan tahun 2021

Tahap 1 (Juni-Juli)	Tahap 2 (Agustus-September)	Tahap 3 (Oktober-November)	Tahap 4 (Desember)
<b>Koordinasi Stakeholder</b>	<b>Pemetaan/tracing klaster UMKM</b>	<b>Digitalisasi pemasaran</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi literatur klasterisasi UMKM</li> <li>• Pengumpulan materi digitalisasi produksi dan pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan klaster UMKM</li> <li>• Tracing sistem pemasaran UMKM</li> <li>• Pendampingan pengurusan legalitas usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan manajemen proses produksi</li> <li>• Pelatihan manajemen pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi keberlanjutan program.</li> <li>• Laporan akhir kegiatan penguatan UMKM di Kota Malang</li> </ul>

Dalam pelaksanaan DM Institusi 2021 di wilayah Kota Malang memiliki beberapa program antara lain terjalannya kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Brawijaya terkait pengembangan UMKM di wilayah Kota Malang. Hal tersebut bertujuan agar UMKM memiliki pemahaman yang lebih luas tentang legalitas dan standarisasi produk UMKM di era globalisasi. Dengan adanya Roadmap Pengembangan UMKM tersebut menjadikan UMKM di wilayah Kota Malang menjadi lebih produktif, kreatif, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Tim DM Institusi mengajukan MoU (Nota Kesepahaman) antara Diskoperindag Kota Malang dengan LPPM UB dalam pengembangan UMKM di wilayah Kota Malang. Tim DM Institusi mendampingi dalam legalitas usaha dan standarisasi produk UMKM. Tim DM Institusi berusaha menghubungkan mitra UMKM dengan lembaga sertifikasi dan standarisasi dalam rangka penguatan produk UMKM yang berada di wilayah Kota Malang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

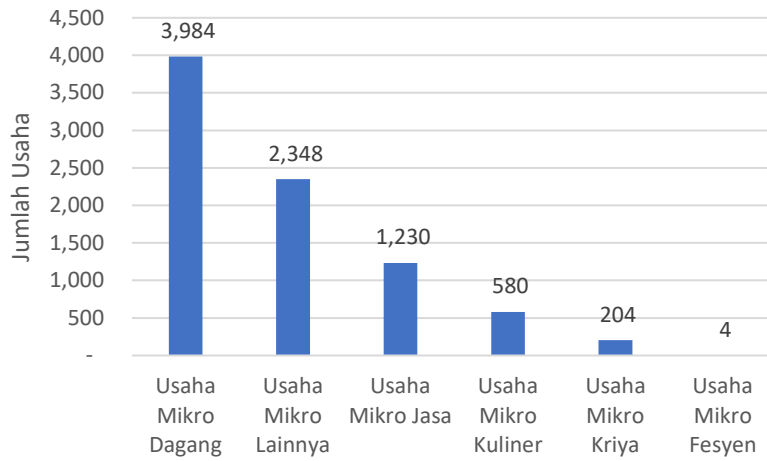
### 1) Legalitas

Salah satu kendala pendampingan UMKM mitra Diskoperindag Kota Malang adalah pengurusan legalitas usaha yang sebenarnya dapat bermanfaat bagi penguatan kelangsungan usaha dan mempertahankan kualitas produk. Kendala yang dirasakan pelaku UMKM seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya administrasi dan kurangnya pengetahuan. Legalitas yang dimaksudkan dalam Program DM Institusi ini adalah sertifikasi produk UMKM Olahan rimpang. Legalitas yang perlu diperhatikan bagi UMKM olahan rimpang, antara lain adalah: (1) PIRT. PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Bagi UMKM Olahan Rimpang menjadi suatu keharusan untuk memiliki sertifikasi PIRT; (2) HALAL. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bagi UMKM Olahan Rimpang, pengurusan Sertifikasi Halal secara online di [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id) [5]; (3) BPOM. Sertifikasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan izin edar produk dan kepedulian (awareness) produsen terhadap konsumen secara luas. Usaha Mikro kesulitan mendapatkan dokumen legalitas adalah karena persyaratan dokumen tersebut, khususnya BPOM, sangat ketat. UMKM Olahan rimpang menghadapi kendala dengan pengurusan BPOM, karena harus memiliki dapur terpisah dari dapur rumah tangga. Selain itu, biaya yang dibutuhkan juga cukup besar dan waktu yang diperlukan lama. Pengurusan Sertifikasi BPOM secara paperless pada laman [www.asrot.pom.go.id/asrot](http://www.asrot.pom.go.id/asrot) [6].

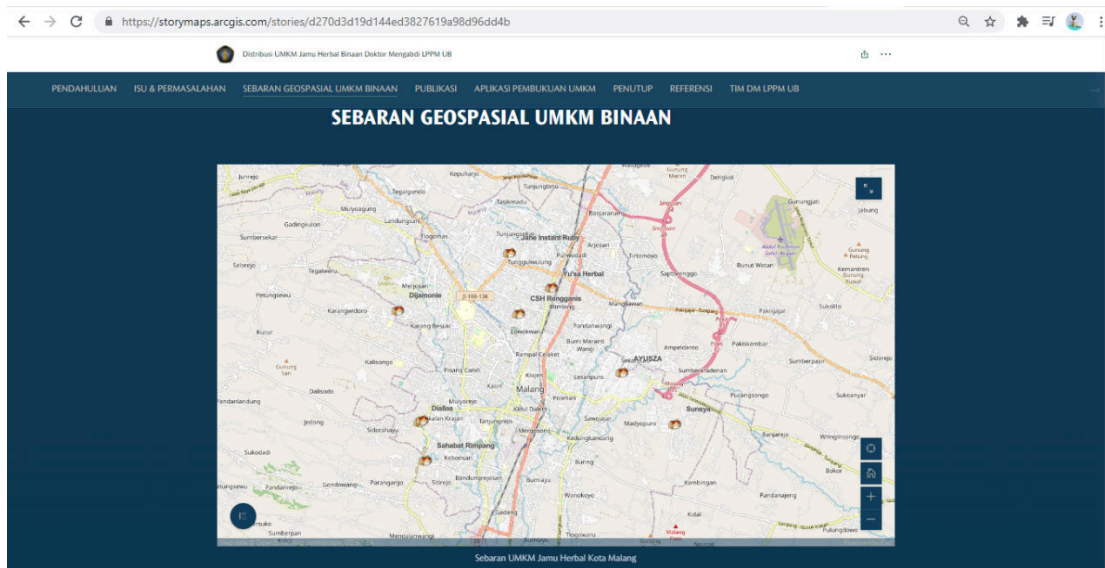
### 2) Pemetaan

Tim DM melakukan pendampingan legalitas dengan berkunjung langsung pada 10 UMKM Olahan Rimpang di Kota Malang untuk pendataan dan melihat ruang produksi. Aspek yang perlu diperhatikan dalam

pengurusan sertifikasi BPOM adalah sanitasi dan higienitas, bahan baku, pekerja dan potensi cemaran ataupun kontaminasi. Tim DM memvisualkan hasil kunjungan lapang WebGIS pada laman <https://s.ub.ac.id/webgisumkmmalang>. Profil UMKM pada laman tersebut terdiri dari nama pemilik, nama usaha, alamat, No HP, sejarah, media sosial, produk, harga dan legalitas. Gambar 3. dan Gambar 4. berikut adalah infografis usaha mikro sebaran pemetaan UMKM di Kota Malang.



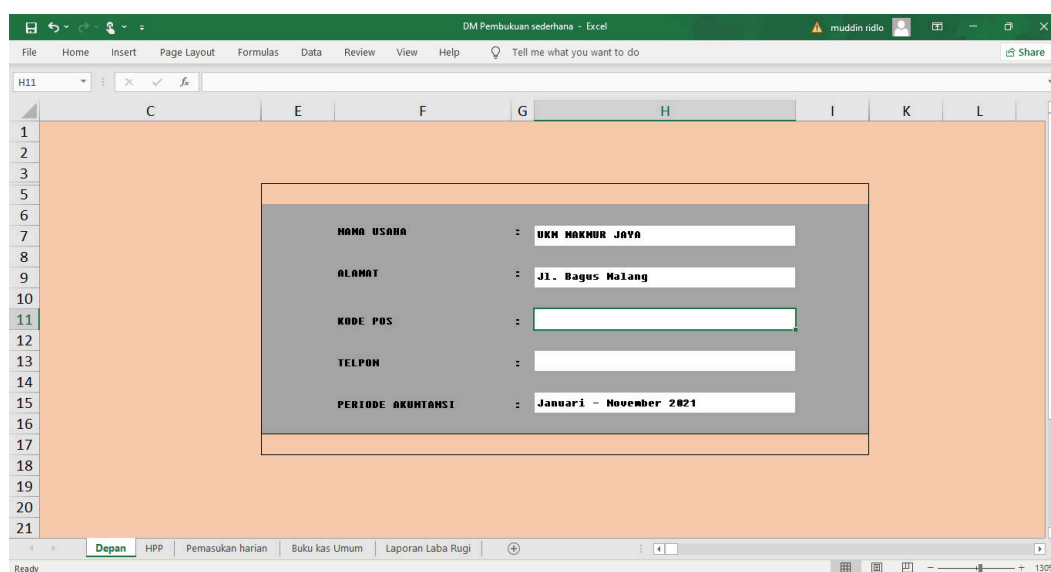
Gambar 3. usaha mikro berdasarkan bidang usaha (<https://diskopindag.malangkota.go.id/>) [7]



Gambar 4. Sebaran geospasial UMKM Binaan

### 3) Pembukuan Keuangan

Pembukuan keuangan bagi UMKM Olahan Rimpang menjadi kendala tersendiri untuk diaplikasikan. Pada suatu saat, UMKM merasa sibuk dengan pekerjaan dan tidak teliti untuk mencatat pada buku keuangan. Namun, UMKM juga memerlukan pencatatan keuangan yang rapi untuk menunjang perkembangan usaha. Permasalahan pembukuan keuangan bagi UMKM ibarat ‘benang ruwet’ yang sulit diurai atau ditemukan ujung pangkalnya. Terkait pendampingan pembukuan keuangan, Diskopindag dan DM Universitas Brawijaya sepakat hal tersebut sangat diperlukan oleh pelaku UMKM sebagai dasar manajemen. File excel pembukuan keuangan yang disusun oleh Tim DM dapat dilihat pada laman <https://s.ub.ac.id/webgisumkmmalang>. File excel terkait pembukuan keuangan UMKM pada laman tersebut terdiri dari sampul, HPP, Pemasukan Harian, Buku Kas Umum dan Laporan Laba Rugi, sebagaimana tersaji pada Gambar 5. sebagai berikut.

Gambar 5. Pelatihan pemasaran *online*

#### 4. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan DM Institusi tahun 2021 di wilayah Kota Malang memiliki beberapa program antara lain terjalannya kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Brawijaya terkait pengembangan UMKM Jamu herbal di wilayah Kota Malang. Hal tersebut bertujuan agar UMKM Jamu herbal memiliki pemahaman yang lebih luas tentang legalitas dan standarisasi produk UMKM Jamu herbal di era globalisasi. Dengan adanya roadmap penguatan legalitas UMKM jamu herbal tersebut menjadikan UMKM jamu herbal di wilayah Kota Malang menjadi lebih produktif, kreatif, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2019. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010-2018. Jakarta: Kemenkop UKM & BPS.
- [2] BPS Kota Malang. 2021. Kota Malang dalam Angka 2021.
- [3] Alvionita YS, Aditya Galih Sulaksono. 2019. Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Malang Berbasis Webgis. Seminar Nasional Sistem Informasi 2019. Fakultas Teknologi Informasi, UNMER Malang.
- [4] Irianto, G. Prabandari, SP. Gama, ZP. Hadi, MS. Jamroni, M. Mahmuddin, R. 2020. Inisiasi dan Pendampingan BUMDes sebagai Embrio Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Bocek, Karangploso, Malang. Prosiding 4<sup>th</sup> Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2020. Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar.
- [5] [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id). Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 13 November 2021.
- [6] [www.asrot.pom.go.id/asrot](http://www.asrot.pom.go.id/asrot). Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 13 November 2021.
- [7] (<https://diskopindag.malangkota.go.id/>). Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 13 November 2021.

#### 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya yang telah memberi dukungan finansial dari anggaran PNPB tahun 2021 terhadap kegiatan pengabdian ini.